

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengujian	iii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Daftar Singkatan	xi
Intisari	xiii
<i>Abstract</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tindak Pidana Korupsi Minor	20
1. Pengertian	20
2. Kerugian Keuangan Negara	25
B. Keadilan Restoratif	26
1. Pengertian	26
2. Asas-Asas dalam Keadilan Restoratif	30
3. Kedudukan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	32
4. Kedudukan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	33
C. Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana	37
1. Pengertian	37
2. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana	38
3. <i>Deffered Prosecution Agreement (DPA)</i>	39
4. <i>Plea Bargaining</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN	45

	A. Jenis Penelitian	46
	B. Sifat Penelitian	47
	C. Sumber Data	48
	D. Cara dan Alat Penelitian	51
	E. Analisis Data Penelitian	53
	F. Jalannya Penelitian	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
	A. Praktik-Praktik Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi ..55	
	1. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....60	
	2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan negara	65
	3. Tindak Pidana Korupsi yang Dihentikan pada Tahap Penuntutan.....70	
	4. Pemulihan pada Keadaan Semula	76
	5. Analisis	80
	B. Analisis Kriteria Tindak Pidana Korupsi Minor	99
	1. Analisis Biaya Penanganan Perkara dan Kerugian Keuangan Negara	99
	2. Analisis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....105	
	3. Analisis Berdasarkan Doktrin dan Teori Hukum.....113	
	C. Analisis Penerapan Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Minor dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....128	
	1. Penerapan Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Minor.....128	
	2. Penerapan <i>Deffered Prosecution Agreement</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Minor.....138	
	3. Penerapan <i>Plea Bargaining</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Minor	142
	4. Peranan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Minor.....146	
BAB V	PENUTUP	149
	A. Kesimpulan	149
	B. Saran	151
	Daftar Pustaka	152
	Lampiran	159